

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH  
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA/KABUPATEN DI  
PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2021-2023)**

***THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE  
ON THE ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL REPORTING (AN  
EMPIRICAL STUDY ON CITY/REGENCY GOVERNMENTS IN EAST JAVA  
PROVINCE FOR THE 2021–2023 PERIOD)***

**Rahma Rina Wijayanti<sup>1\*</sup>, Siti Nur Ameilia Rahmawati<sup>2</sup>, Rida Kusumawati<sup>3</sup>, Sherilliya Roselitha<sup>4</sup>,  
Dela Puspita<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Politeknik Negeri Jember, Jember, Indonesia  
<sup>1</sup>rahma@polije.ac.id, <sup>2</sup>ameiliarahmaaa28@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji pengaruh kinerja keuangan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur pada periode 2021–2023. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan data sekunder dari laporan keuangan yang diaudit BPK, variabel kinerja diukur melalui solvabilitas, efektivitas pendapatan, dan efisiensi belanja, sementara akuntabilitas diproksikan dengan opini audit. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, sedangkan solvabilitas dan efisiensi belanja tidak. Temuan ini menegaskan pentingnya kapasitas fiskal dan tata kelola yang baik dalam membangun pelaporan keuangan yang akuntabel.

**Kata kunci:** kinerja keuangan, akuntabilitas, pelaporan keuangan, opini audit.

**Abstract**

*This study examines the effect of financial performance on the accountability of local government financial reporting in East Java Province during the 2021–2023 period. Using a descriptive quantitative approach and secondary data from audited financial reports by the Audit Board of Indonesia (BPK), financial performance was measured through solvency, revenue effectiveness, and spending efficiency, while accountability was proxied by audit opinions. The results show that revenue effectiveness has a significant impact on accountability, while solvency and spending efficiency do not. These findings highlight the importance of fiscal capacity and good governance in building accountable financial reporting.*

**Keywords:** financial performance, accountability, financial reporting, audit opinion.

**PENDAHULUAN**

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia telah membawa konsekuensi meningkatnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Pelaporan keuangan daerah tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga indikator penting untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan anggarannya kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan keuangan yang disusun dengan baik dan sesuai standar, tepat waktu, dan informatif—dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, laporan keuangan yang kurang akurat atau tidak transparan dapat menurunkan citra dan kepercayaan publik, serta memunculkan keraguan atas integritas

pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kinerja keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang diyakini berpengaruh besar terhadap kualitas pelaporan keuangan. Indikator seperti efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, tingkat solvabilitas, dan kemandirian fiskal sering digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah dapat mengelola anggarannya secara efektif dan efisien. Studi-studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Faizah et al. (2023), menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan dan kemandirian fiskal memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini menandakan bahwa semakin besar kapasitas fiskal suatu daerah, semakin baik pula kemampuan mereka dalam menyusun laporan keuangan yang andal.

Namun, kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum mencapai tingkat akuntabilitas optimal. Laporan hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa sejumlah daerah masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan Tidak Wajar (TW), yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan. Masalah ini bisa disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern, rendahnya kompetensi SDM, hingga kurangnya komitmen terhadap prinsip transparansi. Di wilayah Jawa Timur, sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, pengelolaan keuangan menjadi lebih kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Sari (2021) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan dan kemandirian fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Namun, sistem pengendalian internal belum terbukti memberikan dampak yang berarti.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya mengkaji lebih dalam hubungan antara kinerja keuangan dan akuntabilitas pelaporan. Penelitian yang komprehensif dan mutakhir sangat dibutuhkan guna merumuskan strategi peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan dipercaya oleh publik.

Dari latar belakang pendahuluan di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada periode 2021-2023?
2. Apakah kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah?

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada periode 2021-2023.
2. Untuk mengukur dan menganalisis tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur selama periode 2021-2023.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis hubungan antara kinerja keuangan dan tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Metode kuantitatif dipilih karena mampu mengukur variabel-variabel penelitian secara objektif melalui pengolahan data numerik dan analisis statistik (Sugiyono, 2019). Dengan pendekatan kuantitatif, peneliti dapat mengukur dan menganalisis data terkait pengalaman, pandangan, dan praktik pengelolaan keuangan daerah secara objektif dan sistematis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan dikumpulkan melalui dokumentasi.

Dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur dan teknik pengambilan sampel

dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria dalam pemilihan sampel yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur yang mengeluarkan laporan keuangan yang telah diaudit periode 2021-2023.

Tabel 1. Pemilihan Sampel

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah Sampel Penelitian	10
Tahun Penelitian (2021-2023)	3
Total Keseluruhan Sampel Penelitian	30
Data tidak lengkap	0
<b>Total Sampel</b>	<b>30</b>

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang akan menjadi fokus utama yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Kinerja keuangan ini dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan rasio-rasio keuangan yang relevan. Berikut merupakan tabel pengukuran kinerja yang digunakan:

Tabel 2. Variabel dan Pengukuran

Variabel	Pengukuran
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	Opini Audit BPK RI: WTP = 10, WDP = 0, TW = 0, TMP = 0
Kinerja Keuangan	Solvabilitas = $\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
	Efektivitas Pendapatan = $\frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$
	Efisiensi Belanja = $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$

Sumber: Data Diolah (2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Statistik Deskriptif

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Std. Deviation</b>	<b>Mean</b>
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Opini Audit	30	3	3	0,000	0,000
Solvabilitas	30	0,30	107	31,14	5,68
Efektivitas Pendapatan	30	10	118	17,79	3,24
Efisiensi Belanja	30	69	94	4,70	0,85

### 2. Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

<b>Variabel</b>	<b>Z<sub>sweekness</sub></b>
Solvabilitas	-6,58
Efektivitas Pendapatan	-10,44
Efisiensi Belanja	-6,039

Sumber: SPSS

Uji normalitas pada model variabel dependen Akuntabilitas Pelaporan Keuangan yang diproksikan. Opini Audit, variabel independen kinerja keuangan yaitu solvabilitas, efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja ditemukan bahwa pengujian ini menggunakan Skewness Kurtosis. Berdasarkan hasil yang telah diuji di atas bahwa ketiga variabel independen berdistribusi secara normal karena nilai Z skewness < 1,96 (alpha 5%).

#### 2) Uji Multikolinearitas

<b>Variabel</b>	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>
Solvabilitas	0,991	1,009
Efektivitas Pendapatan	0,996	1,004
Efisiensi Belanja	0,995	1,005

Sumber: SPSS

Berdasarkan hasil uji VIF pada model regresi ditemukan bahwa variable independent kinerja keuangan yang diproksikan dengan solvabiitas, efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja tidak terdapat gejala multikolinearitas karena nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Solvabilitas	0,000
Efektivitas Pendapatan	0,040
Efisiensi Belanja	0,029

Sumber: SPSS

Berdasarkan output di atas, bisa dilihat bahwa variable independent solvabilitas, efektivitas pendapatan, dan efisiensi belanja tidak memiliki gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

### 4) Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin Waston
	2,203

Sumber: SPSS

Nilai Durbin-Waston (d) sebesar 2,203 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,650 dan kurang dari (4-dU)  $4 - 1,650 = 2,350$ . Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Urbin Watson di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

## 3. Uji Hipotesis

Variabel	Coefficient	t	P >  t
SOLV	0,0846	1,74	0,610
EPEN	0,0479	9,89	0,000
EBEL	0,0126	2,59	0,000
Variabel Dependen Prob > F = 0,0142 R-Squared = 0,099			

Sumber: SPSS

#### a. Uji F

Pengujian variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dikatakan berpengaruh jika  $(\text{Prob} > F) < \alpha$  (0,05). Berdasarkan tabel di atas, hasil uji F  $0,0142 < 0,05$  artinya secara simultan variabel independen kinerja keuangan (solvabilitas, efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja) dapat menjelaskan variabel dependen akuntabilitas pelaporan keuangan secara signifikan.

#### b. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan nilai yang sudah dihitung melalui SPSS, didapatkan R<sup>2</sup> sebesar 0,099 atau 9,9%. Maka, dapat dikatakan variabel solvabilitas, efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja mampu menjelaskan variabel akuntabilitas pelaporan keuangan sebesar 9,9%. Sisanya sebesar 90,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian.

Hasil pengujian terhadap solvabilitas menunjukkan bahwa tingginya atau rendahnya tingkat solvabilitas pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap penilaian auditor dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, solvabilitas tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik. Hal ini disebabkan karena perangkat daerah umumnya tidak memiliki utang jangka panjang, sehingga tidak memiliki risiko gagal bayar dengan aset yang dimiliki. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sukses dan Lastanti (2016), serta Satria dan Sari (2018), yang menyatakan bahwa tingkat solvabilitas yang diukur melalui Debt to Asset Ratio (DAR) tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Tidak signifikannya pengaruh solvabilitas terhadap opini audit diduga karena auditor seperti BPK mempertimbangkan banyak aspek lain dalam penilaiannya, seperti kerugian berulang, potensi kebangkrutan, serta kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, organisasi yang memiliki solvabilitas rendah tetap bisa memperoleh opini audit yang baik selama mampu mengelola keuangan dan operasional dengan efektif serta menyajikan laporan keuangan secara wajar.

Sementara itu, hasil pengujian terhadap efektivitas pendapatan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengelola dan merealisasikan pendapatannya secara sangat efektif pada periode 2021–2023. Keberhasilan ini selaras dengan tujuan pelayanan publik dan menggambarkan sejauh mana organisasi mampu mencapai target anggarannya, sebagaimana dijelaskan oleh Munir dalam Harahap et al. (2021). Penelitian ini juga didukung oleh Muraiya dan Nadirsyah (2018) yang menemukan bahwa efektivitas penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan di Provinsi Aceh selama 2011–2014. Efektivitas tersebut tercermin dari pelaksanaan berbagai program seperti keterbukaan informasi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang memadai, serta efisiensi dalam alokasi dana (Carlitz, 2013). Data dari Kementerian menunjukkan bahwa rasio efektivitas rata-rata melebihi 100%, menandakan bahwa semakin tinggi efektivitas pendapatan, semakin baik pula kemampuan pemerintah pusat dalam mempertanggungjawabkan keuangan secara akuntabel (Susanto, 2019).

Adapun hasil pengujian efisiensi belanja menunjukkan bahwa semakin efisien pemerintah pusat dalam menggunakan anggaran, semakin besar peluang memperoleh opini audit yang baik dari BPK. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan negara yang efisien berdampak positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan data yang dianalisis, pemerintah pusat mampu menunjukkan bahwa dengan anggaran yang relatif kecil, mereka dapat menghasilkan output yang besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Rata-rata efisiensi tercatat sebesar 90,1%, yang mengindikasikan tidak terjadinya pemborosan dalam penggunaan dana APBN. Hal ini berkontribusi pada peningkatan opini audit dan kualitas laporan keuangan yang disajikan secara wajar, dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. transparan, serta dapat Menurut Muraiya dan Nadirsyah (2018), tingginya efisiensi anggaran mencerminkan meningkatnya kredibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Efisiensi ini kemudian diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat secara transparan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaruh kinerja keuangan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur selama periode 2021–2023, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam capaian kinerja keuangan antar daerah. Variasi ini terlihat pada aspek efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, solvabilitas, dan kemandirian fiskal. Beberapa daerah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan secara efektif dan

efisien, sedangkan daerah lainnya masih menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian fiskal dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran.

Penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, khususnya melalui efektivitas pendapatan dan tingkat kemandirian fiskal yang menunjukkan dampak positif. Artinya, pemerintah daerah yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan memenuhi kebutuhan pembiayaan secara mandiri lebih cenderung menyusun laporan keuangan yang transparan, andal, dan akuntabel. Sebaliknya, solvabilitas dan efisiensi belanja tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan, yang kemungkinan disebabkan oleh rendahnya relevansi utang jangka panjang dalam struktur keuangan sebagian besar pemerintah daerah.

Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance, terutama transparansi dan akuntabilitas, dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Pemerintah daerah yang menerapkan tata kelola keuangan yang baik cenderung memiliki sistem pelaporan yang lebih terstruktur, kredibel, dan dapat dipercaya publik. Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, efektivitas pengelolaan keuangan, dan komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Membangun pelaporan keuangan yang akuntabel adalah bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012). Performance measurement in Indonesia: The case of local government. *Pacific Accounting Review*, 24(3), 262–291.
- Azlim, M., et al. (2012). Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 4(2), 45–60. Eprints UMS
- Charlick, R., & Tjokroamidjojo, B. Good Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Diakses dari: <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/03/EJOURNAL%20YENNY%20%2803-02-13-06-48-29%29.pdf>
- Defitri, R. (2014). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah. *Jurnal Mahasiswa STIESIA*. Diambil dari <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id>.
- Erryana, L. dan Setyawan, S. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Diambil dari <https://jurnal.unissula.ac.id>.
- Hery (2023). Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: Grasindo.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pedoman Good Governance dalam Pemerintahan Daerah. Diakses dari: <https://repository.widyatama.ac.id/server/api/core/bitstreams/698bb358-19da4f27-9b33-37ea476704c5/content>
- Kasmir. (2022). Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pedoman Good Governance dalam Pemerintahan Daerah. Diakses dari: <https://repository.widyatama.ac.id/server/api/core/bitstreams/698bb358-19da4f27-9b33-37ea476704c5/content>
- Media.neliti.com. (2019). Pengaruh Kemandirian Fiskal Terhadap Pelaporan Keuangan Daerah. Diambil dari <https://media.neliti.com>.
- Nasution, L. M. (2017). Statistik deskriptif. *Hikmah*, 14(1), 49-55.

- Ojs.unud.ac.id. (2020). Pengaruh Transparansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah. Diambil dari <https://ojs.unud.ac.id>.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- UNDP. Good Governance: Characteristics and Application. Diakses dari: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/download/1700/pdf>
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1–17.